

PERAN HMI DALAM TANTANGAN PERJUANGAN YANG PROAKTIF

Oleh Nurcholish Madjid

Selain keindonesiaan atau kebangsaan dan kemahasiswaan, kualifikasi HMI sebagai gerakan pemuda adalah keislaman. Maka, selain harus tampil sebagai pendukung nilai-nilai keindonesiaan dan kemahasiswaan, HMI juga harus tampil sebagai pendukung nilai-nilai keislaman. Sekalipun dukungan pada nilai-nilai keislaman itu tetap dalam format yang tidak dapat dipisahkan dari keindonesiaan dan kemahasiswaan. Artinya, penghayatan HMI pada nilai-nilai keislaman tentu tidak dapat lepas dari lingkungan keindonesiaan (antara lain, demi efektivitas dan fungsionalitas keislamannya itu sendiri). Dan juga tidak lepas dari nilai kemahasiswaan (yaitu suatu pola penghayatan keislaman yang lebih cocok dengan kelompok masyarakat yang menikmati hak istimewa sebagai anggota *civitas academica*, yang menurut konstitusi HMI sendiri disebut sebagai “insan akademis”).

Karena keindonesiaannya itu, HMI tampil sebagai organisasi Islam dalam format dan citra yang sedikit banyak berbeda dari penampilan organisasi Islam dalam kawasan lingkungan budaya besar Arab (yang terbentang sejak dari Bahrain sampai Maroko). Juga berbeda dari yang ada dalam kawasan lingkungan budaya besar Persi (yaitu kawasan Islam Asia Daratan, sejak dari Bangladesh sampai Turki, yang dapat diteruskan ke Eropa Timur seperti Bosnia, Macedonia, Chechnya, dan Albania).

Perbedaan-perbedaan itu sebenarnya nisbi belaka, namun tetap penting karena merupakan fungsi dari adaptasi kreatif yang melahirkan efektivitas. HMI berkiprah dalam lingkungan Asia Tenggara dengan lingkungan budaya besar Melayu, di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Khazanah budaya Islam mengenal adanya gaya keislaman dengan warna budaya Arab yang pekat dan gaya keislaman dengan warna budaya Persi yang jelas. Kedua gaya itu secara ilmiah keagamaan diakui oleh dunia, termasuk Dunia Islam sendiri. Gaya ketiga yang memperoleh pengakuan ilmiah keagamaan penuh, yaitu gaya keislaman dengan warna budaya besar Melayu di Asia Tenggara ini.

Trilogi Islam Misi HMI:

Da'wah ilā 'l-Khayr, Amr Ma'rūf, dan Nahy Munkār

Meskipun diakui adanya perbedaan ini, tidak bisa kita pungkiri adanya titik-titik temu yang menghubungkan budaya Islam secara universal. Salah satu titik-temu itu berupa komitmen masing-masing pribadinya pada kewajiban menjalankan setiap usaha untuk menciptakan masyarakat yang sebaik-baiknya di muka bumi ini. Kewajiban itu dinyatakan dalam firman Allah yang sering dikutip, yaitu:

“Hendaknya di antara kamu ada umat yang melakukan da'wah ilā 'l-khayr, amr ma'rūf dan nahy munkār, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia,” (Q 3:104).

Sengaja ungkapan-ungkapan al-Qur'an tentang kewajiban kaum Muslim itu tidak kita terjemahkan, karena masing-masingnya sarat dan padat dengan makna yang tidak mudah dipindahkan ke bahasa lain. Setiap usaha pemindahannya pada bahasa lain melalui terjemahan, tentu akan melibatkan kompromi makna sehingga tidak selalu tepat. Sebagai contoh, terjemah *al-Khayr*

menjadi “kebajikan” (Tafsir Departemen Agama), “kebaikan” (Tafsir Mahmud Yunus), atau “bakti” (Tafsir *al-Furqān*, A. Hassan). Masing-masing terjemahan di atas mempunyai keabsahan sendiri, namun tentu tidak secara sempurna membawakan makna *al-khayr*. Sedangkan Rasyid Ridla dalam tafsir *al-Manār* yang sangat terkenal itu menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-khayr* dalam firman itu adalah *al-Islām* dalam makna generiknya yang umum dan universal, yaitu agama semua Nabi dan Rasul sepanjang zaman. Jadi, sesungguhnya *al-khayr* di situ adalah kebaikan universal; suatu nilai yang menjadi titik-temu semua agama yang benar, yaitu agama Allah yang disampaikan kepada umat manusia lewat wahyu Ilahi (juga disebut agama *samāwī* atau “agama langit”). Dalam tafsirnya ini Rasyid Ridla mengatakan:

Da‘wah ilā ‘l-khayr ini bersama dengan “*amr*” dan “*nahy*” mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama adalah ajakan umat ini kepada semua umat yang lain agar melakukan *al-khayr* dan agar mereka mengikuti umat ini dalam cahaya dan hidayah. Dan di sinilah yang dituju oleh penafsir ini: bahwa yang dimaksud dengan *al-khayr* adalah *al-Islām*. Kami telah menafsirkan *al-Islām* sebelumnya bahwa ia adalah agama Allah melalui lisan semua para Nabi kepada semua umat, yaitu (ajaran) keikhlasan kepada Allah Ta‘ala dan kembali meninggalkan hawa nafsu menuju pada hukum-Nya. Ini dituntut dari kita sebagai konsekuensi dijadikannya kita umat tengah (*wasath*) dan saksi atas sekalian umat manusia.¹

Dalam tafsiran Rasyid Ridla tentang *al-khayr* sebagai *al-Islām* (dalam makna generiknya, bukan makna sosiologis-historisnya saja) jelas terkandung pengertian “kebajikan universal”, yaitu nilai-nilai moral dan etis atau *al-akhlāq al-karimah*. Adalah *al-akhlāq al-karimah* itu yang ditegaskan Nabi saw dalam sebuah hadis sebagai tujuan beliau diutus Allah kepada umat manusia (yaitu hadis,

¹ Lihat *Tafsīr al-Manār*, 4:27

“*Sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan berbagai keluhuran budi*”).

Ungkapan “*amr ma’rūf*” memerlukan sedikit kejelasan. Meskipun kita semua merasa sudah tahu maksud ungkapan itu, namun untuk penajaman pemahaman kita ada baiknya kita lakukan tinjauan sekilas dari segi kebahasaan atau etimologisnya. Secara kebahasaan, *al-ma’rūf* berarti “yang telah diketahui”, yakni “yang telah diketahui sebagai baik” dalam pengalaman manusia menurut ruang dan waktu. Oleh karena itu, secara etimologis pula perkataan itu berkaitan dengan perkataan *al-‘urf* yang berarti “adat”, dalam hal ini adat yang baik. Dalam pengertiannya sebagai adat yang baik itulah *al-‘urf* diakui eksistensi dan fungsinya dalam Islam, sehingga dalam teori pokok yurisprudensi disebutkan bahwa “adat dapat dijadikan hukum”.

Dalam pengertiannya yang lebih luas dan mendalam, perkataan *al-ma’rūf* dapat berarti kebaikan yang “diakui” atau “diketahui” oleh hati nurani, sebagai kelanjutan dari kebaikan universal tersebut (*al-Islām* adalah agama *fithrah* yang suci). Karena *al-ma’rūf* dalam pengertian ini adalah sebagai lawan dari *al-munkār*. Sebab, *al-munkār* adalah apa saja yang “diingkari”, yakni diingkari oleh *fithrah*, atau ditolak oleh hati nurani. Kemudian kedua-duanya ini menunjuk pada kenyataan kebaikan dan keburukan dalam masyarakat. Umat Islam dituntut untuk mampu mengenali kebaikan dan keburukan dalam masyarakat itu, kemudian mendorong, memupuk, dan memberanikan tindakan-tindakan kebaikan, dan pada waktu yang sama mencegah, menghalangi, dan menghambat tindakan-tindakan keburukan.

Trilogi *da‘wah ilā ‘l-khayr*, *amr ma’rūf*, dan *nahy munkār* merupakan poros perjuangan umat Islam sepanjang sejarah. Trilogi itulah yang menjadi dasar keunggulan umat Islam atas umat-umat yang lain. Sehingga mereka pun disebut sebagai “yang beruntung, yang menang, atau yang berbahagia” (*al-muflihūn*). Namun, semua itu tidak bisa disikapi dengan secara “*taken for granted*”. Yang pertama dari trilogi itu, yaitu *da‘wah ilā ‘l-khayr*, menuntut kemampuan

umat Islam—melalui para pemimpinnya—untuk dapat memahami nilai-nilai etis dan moral yang universal, yang berlaku di setiap zaman dan tempat. Inilah yang dapat dipahami dari tafsiran Rasyid Ridla di atas. Tanpa kemampuan itu kita tidak akan mempunyai pedoman yang jelas, yang menjadi tuntunan dan bimbingan kita menghadapi masa depan.

Sedangkan yang kedua dari trilogi itu, yaitu *amr ma'rūf*, menuntut kemampuan memahami lingkungan hidup sosial, politik, dan kultural. Yaitu lingkungan yang menjadi wadah terwujudnya *al-khayr* secara konkret, dalam konteks ruang dan waktu (contohnya yang sedikit karikatural; dahulu celana panjang sebagai sarana penutup aurat pernah merupakan barang *munkār*, namun sekarang sudah dapat diterima sebagai “baik-baik” saja, yakni *ma'rūf*, dan yang serupa “celana” itu cukup banyak). Juga lingkungan dalam konteks ruang dan waktu itu yang menjadi wadah keburukan nyata, yang beroperasi dalam masyarakat. Lingkungan yang buruk akan menjadi “wadah” bagi *al-munkār*, sehingga masyarakat bersangkutan mungkin akan terkena wabah dosa dan kezaliman. Karena itu, yang ketiga dari trilogi perjuangan Islam tersebut, yaitu *nahy munkār*, menuntut kemampuan kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan hidup kultural, sosial politik, juga ekonomi, yang sekiranya akan menjadi wadah bagi munculnya perilaku, tindakan, dan perbuatan yang berlawanan dengan hati nurani (jadi tidak *ma'rūf*). Kemudian diusahakan untuk mencegah dan menghambat pertumbuhan lingkungan serupa itu.

Pemahaman terhadap lingkungan dalam arti seluas-luasnya itu merupakan fungsi dari ilmu, termasuk sains atau ilmu pengetahuan. Sedangkan sikap membenarkan dan menerima *al-khayr* merupakan fungsi dari iman dan komitmen batin. Karena itu, ia tidak mungkin tanpa *tawhīd* dan takwa kepada Allah (Tuhan Yang Mahaesa), yang merupakan dasar seluruh kegiatan yang benar. Dalam berpartisipasi memperjuangkan terwujudnya masyarakat yang baik, yaitu masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis sebagaimana menjadi cita-cita kita semua, tidaklah mungkin tanpa iman yang

mendalam dan ilmu pengetahuan yang luas. Adalah agama juga yang menegaskan bahwa keunggulan suatu kelompok manusia atas lainnya karena faktor anugerah iman dan ilmu (Q 58:11).

“*Fight for*” dan “*Fight against*”

Sesungguhnya padanan istilah yang kita pinjam dari bahasa Arab (bahasa al-Qur'an), *amr ma'rūf* dan *nahy munkār* terdapat pada istilah (dalam bahasa Inggris) “*fight for*” dan “*fight against*”, yaitu perjuangan proaktif dan perjuangan reaktif. Kedua-duanya itu sangat penting dan mempunyai fungsi sendiri-sendiri, namun dapat ditentukan mana tekanan utama dan mana pula tekanan kedua dalam konteks ruang dan waktu.

Setelah 48 tahun menghadirkan dirinya di atas pentas kehidupan umat, bangsa, dan negara, HMI banyak menghadapi tantangan. Bukan saja karena ia harus menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan perannya, tetapi juga karena justru untuk meningkatkan peran itu HMI harus mampu memberi responsi pada tantangan zaman yang berbeda dari yang pernah ada. Berkenaan dengan ini, saya sering mengemukakan bahwa tantangan sekarang tidak lagi lebih banyak bersifat “*fight against*” atau “berjuang melawan” seperti dahulu sekitar awal kelahiran Orde Baru ketika negara terancam oleh berkembangnya ideologi anti-Pancasila dan anti-agama; tantangan sekarang lebih banyak menuntut kemampuan untuk “*fight for*” atau “berjuang untuk”, yakni sikap-sikap proaktif (positif), bukan reaktif (negatif). Agaknya hanya jika HMI mampu melancarkan sikap-sikap proaktif-positif itu maka “*raison etre*”-nya akan tetap bertahan dan kukuh. Ini bukanlah Darwinisme, tetapi jelas dalam hubungan sosial yang sistemik dan sibernatik. Kemampuan beradaptasi adalah prasyarat untuk “*survive*”—tidak dalam artian oportunistik seperti dikonotasikan dalam kata-kata “adaptasi” dan “*survival*” dalam dunia perpolitikan—tetapi dalam artian kemampuan untuk terus berkiprah, berpartisipasi, dan

memberi kontribusi pada kemajuan masyarakat dan bangsa secara positif.

Jika secara analitis kita lakukan identifikasi tema perjuangan “*fight against*” di satu pihak dan “*fight for*” di lain pihak, tidak berarti bahwa salah satu dari keduanya itu, misalnya “*fight against*” tidaklah penting. Identifikasi itu hanyalah untuk memberi tekanan yang lebih besar pada salah satu dari keduanya, sesuai dengan tantangan zaman. Sementara itu kedua-duanya—mungkin dengan kadar tekanan yang berbeda—dapat berjalan bersama dan seiring. Tetapi, jelas ada saat-saat ketika salah satu dari keduanya itu lebih penting dan urgen daripada lainnya. Misalnya, di sekitar tahun 60-an, mungkin juga awal 70-an, tekanan perjuangan HMI adalah lebih banyak pada “*fight against*”. Yaitu perjuangan melawan kaum pendukung ideologi yang anti-agama dan anti-Pancasila, khususnya PKI. Pada waktu itu para aktivis HMI—dengan bimbingan para seniornya yang sangat berpengalaman dan bijak seperti Achmad Tirtosudiro dan A. Dahlan Ranuwihardjo—telah dapat mencapai kecanggihan yang tinggi dalam melaksanakan perjuangannya melawan musuh-musuh negara. Dan kecanggihan itu, dalam bentuk pola perjuangan yang rasional, metodologis, dan sistematis, telah menghasilkan efektivitas yang tinggi. Karena itu, siapa pun mengetahui dan mengakui bahwa peranan HMI dalam fase-fase itu sangat menentukan.

Namun, pada waktu yang sama HMI juga melakukan perjuangan dengan tema “*fight for*” yang proaktif dan positif. Misalnya, kita tidak saja sekadar “melawan” konsep PKI dan para pendukungnya bahwa Pancasila hanyalah alat pemersatu; HMI serentak dengan itu mendukung konsep bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa yang berasal dari titik-temu berbagai golongan di tanah air. Sebagai alat pemersatu, seperti dikatakan kaum komunis (yang pada dasarnya menolak Pancasila), maka rumusan Pancasila yang lima itu hanya mempunyai nilai instrumental, dalam pengertian bahwa jika persatuan yang menjadi tujuannya telah terwujud, maka Pancasila itu dapat dibuang. Sebaliknya, pandangan bahwa

Pancasila adalah jiwa dan pandangan hidup bangsa, melahirkan wawasan bahwa Pancasila mempunyai nilai intrinsik, tidak sekadar instrumental. Sebagai yang bernilai intrinsik, masing-masing silanya adalah tujuan dalam dirinya sendiri. Karena itu, semuanya harus dielaborasi dengan jelas, kemudian dijalankan dalam masyarakat secara konsisten dan konsekuen. HMI mendukung wawasan ini, dan dukungan itu merupakan pola dari perjuangannya yang bersifat “*fight against*”. Walaupun begitu, kenyataannya adalah bahwa saat-saat yang lebih urgen dan merupakan urutan prioritas utama perjuangannya adalah melawan PKI dan pendukungnya yang muncul dalam Gestapu-PKI.

Pada saat sekarang ini, jelas sekali bahwa skala prioritas perjuangan telah berubah. Dalam zaman pembangunan ini, yang lebih banyak dituntut adalah kemampuan untuk berpartisipasi secara proaktif dan positif. Jadi tekanan lebih diberikan pada segi “*fight for*”. Oleh karena itu, yang lebih dipentingkan bukanlah sekadar semangat berapi-api dan berkobar saja, melainkan kemampuan teknis yang tinggi, yang “*highly qualified*”. Kemampuan ini lebih banyak mengarah pada kecakapan “*problem solving*” daripada “*solidarity making*”. Kemampuan teknis yang tinggi ini memerlukan wawasan keilmuan yang mendalam, disertai keterlibatan yang tulus dalam masalah-masalah kemasyarakatan. Tekanan kiprah pada kemampuan “*problem solving*” itu—yang dihadapkan pada “*solidarity making*”—dalam bahasa retorika populer kira-kira dapat disebut sebagai “Hattaisme” dalam penghadapannya kepada “Sukarnoisme”. Diakui bahwa penyebutan ini mengandung simplikasi, namun kiranya masih dapat dibenarkan karena memang ciri kepemimpinan Bung Hatta adalah “*problem solving*”, sedangkan ciri kepemimpinan Bung Karno adalah “*solidarity making*”. Jadi, saat ini kita lebih banyak memerlukan Hatta-Hatta, dan sedikit saja memerlukan Sukarno-Sukarno, meskipun sejumlah Sukarno tetap berguna.

Dalam nada yang simpatik pada HMI sekarang ini sering disinyalir sebagai “mundur”, “tidak bergairah”, “melempem”, dan

lain-lain (yang sebagian, dilihat dari gejala lahiriahnya, memang benar). Perjuangan dengan tekanan pada “*problem solving*” sebagai wujud dari “*fight for*” yang proaktif memang lebih sulit, lebih “dingin”, lebih bersifat “kerja tekun” daripada “kerja berkobar”. Karena itu, *last but not least*, “kerja tekun” sebagai pola perjuangan itu juga bisa menjadi kurang menarik bagi orang banyak (yakni, orang umum yang dalam bahasa Arab disebut *‘awām* diindonesikan menjadi “awam”). Tentunya jika ini dibandingkan dengan “*solidarity making*” dan “*fight against*” yang lebih mudah dituangkan dalam retorika-retorika panas, negatifistik, populer, dan “menggairahkan” orang banyak.

Kesan HMI sebagai “melempem” sebagian adalah karena bagi himpunan ini tidak lagi mungkin bersandar pada model eksistensi dengan pola perjuangan berkobar lewat pidato-pidato panas dan retorika bombastis. Model ini meskipun barangkali menarik untuk orang awam tetapi perannya dalam mencari pemecahan masalah masyarakat, umat, bangsa, dan negara sangat kecil. “Perjuangan melawan” menurut tabiatnya sendiri akan selalu bersifat jangka pendek sedangkan “perjuangan membangun” akan bersifat jangka panjang dan mengikuti garis kontinum yang tidak boleh terputus-putus, dengan grafik yang harus selalu menanjak (artinya, selalu berproses menuju pada keadaan yang lebih baik). Konsistensi yang diperlukan untuk menjaga garis kontinum itu tidak lain adalah fungsi dari iman dan ilmu: komitmen pribadi yang sedalam-dalamnya pada nilai etis dan moral, dan pengetahuan yang tepat tentang lingkungan sehingga dapat bertindak proporsional dan efektif.

Kedaulatan Rakyat menuju Masyarakat Sejahtera dan Adil

Dalam kerangka berpikir di atas itu kita ingin melihat kemungkinan peningkatan peran HMI di masa mendatang. HMI, dan siapa saja, tidak akan mampu berperan besar, *resourceful* dan efektif

jika tidak memiliki komitmen yang sejati pada kedaulatan rakyat. Jargon “pemihakan kepada kaum tertindas” sudah merupakan ungkapan harian di negeri kita. Jelas jargon itu menunjukkan wawasan yang benar dan baik. Namun kita—guna mewujudkan apa yang dimaksud dengan jargon itu—pertama-tama memerlukan ketulusan dalam pengikatan batin pada maknanya, yaitu pembelaan kaum miskin dan perjuangan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Ketulusan ini—menurut istilah seorang ilmuwan sosial terkemuka, Dr. Taufik Abdullah—adalah yang merupakan “*fardlu ‘ayn*”, merupakan kewajiban setiap individu tanpa kecuali. Tanpa ketulusan itu semua sepak-terjang menjadi *muspra*, hilang tanpa makna.

Indikasi pertama ketulusan itu adalah konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Dan ini, sebagaimana telah dikemukakan tadi, menyangkut budi pekerti luhur atau *al-akhlāq al-karimah*. Jika kita memang menghendaki peningkatan peranan dalam hal kenyataan ini, maka kita harus menciptakan otentisitas serta keabsahan etis dan moral kerakyatan dalam diri kita. Jika kita berbicara tentang kerakyatan namun menampilkan diri serba “atas” atau “elit”, maka kita akan kehilangan otentisitas, dan seluruh kiprah kita akan *muspra*. Terkenal sekali ungkapan Arab: *Lisān-u ‘l-ḥal-i afshah-u min lisān-i ‘l-maqāl* (Bahasa kenyataan adalah lebih fasih daripada bahasa ucapan). Kita dapat mengatakan apa saja, namun tingkah laku kita akan lebih menentukan keabsahan apa yang kita maksudkan.

Dalam rangka memperoleh otentisitas dan keabsahan itu, penghayatan dan pengetahuan akan nilai-nilai kerakyatan harus kuat. Penghayatan sendiri dimensinya sangat pribadi, jadi tidak bisa diukur secara obyektif, meskipun dapat termanifestasikan dalam tingkah laku lahiriah. Pengetahuanlah yang berdimensi obyektif, sehingga dapat diketahui, diukur dan dinilai orang luar secara lebih tepat. Pengetahuan ini, yang secara luas disebut informasi, akan menjadi sumber energi dan kekuatan. Pengetahuan akan muncul dalam artikulasi dan elaborasi ide-ide dan aspirasi-aspirasi. Kekuatan seseorang atau suatu kelompok dalam interaksi dengan

sesamanya dalam suatu forum wacana intelektual akan sangat ditentukan oleh kemampuan artikulasi. Maka, ilmu dan *al-hikmah* (*wisdom, shophia*, kearifan) digambarkan dalam kitab suci sebagai anugerah kebaikan yang melimpah (Q 2:269).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran dalam mengemban misinya menegakkan kedaulatan rakyat ini, jelas HMI harus mengadakan pendidikan politik yang luas, mendalam, dan kaya bahan. Meskipun bukanlah organisasi politik—dan sebaiknya *stay away* dari politik (praktis)—namun dari sejak didirikan, HMI mempunyai citra sebagai lembaga perkaderan. Dan perkaderan itu jelas meliputi perkaderan politik, dalam arti menumbuhkan dan mengembangkan potensi generasi bangsa untuk menjadi insan-insan pimpinan dengan etika dan moral yang kuat dan kemampuan tinggi. Dalam pengertian ini, HMI sesungguhnya adalah organisasi “pemuda elit”. Di sini “elit” tidak dimaksud dalam artinya sebagai “sok atas”, melainkan “berkemampuan sangat tinggi” seperti dalam ungkapan bahwa RPKAD adalah pasukan “elit” Angkatan Darat. Analog dengan ungkapan itu, dapat dikatakan bahwa HMI merupakan kelompok “elit” pemuda Indonesia. “Elit” dalam arti pemuda yang memiliki kemampuan individual dan kolektif yang sangat tinggi.

Tetapi, jargon seperti itu akan memukul balik (*backfire*) dan menjadi sumber sinisme jika tidak disertai dengan pengisian dan peningkatan kemampuan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, perkaderan haruslah dibenahi kembali. HMI adalah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang sejak dari lahirnya terkenal dengan sistem pengkaderannya yang runtut dan sistematis. Reputasi itu harus dipertahankan. Tetapi, tidak dengan mengikuti warisan sistem dan materi perkaderan lama secara dogmatis, melainkan menerimanya dalam suatu kesadaran tentang perlunya kontinuitas. Dan pada waktu yang sama mampu mengembangkannya secara kritis dan kreatif. Hanya dengan itu HMI akan mempertahankan dan memperoleh modal eksistensinya yang mantap dan disegani.

Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi

Kedaulatan rakyat adalah nilai yang selalu datang dari bawah, tidak pernah dari atas. Artinya, jika kita hendak menegaskan kedaulatan rakyat, maka tidak mungkin dengan mengharapkan belas kasihan pihak atas, tetapi harus memperjuangkannya dari bawah. Semua teori sosial-politik mengatakan begitu. Pepatah Arab mengatakan, “*al-haqq-u yuthlab-u, lā yu'thā*” (hak itu dituntut, tidak dihadiahkan). Jadi, hak rakyat untuk menyatakan kedaulatannya dan diakui kedaulatannya itu hanya terwujud jika dituntut, dalam arti terus-menerus diperjuangkan dari bawah. Hak itu tidak akan “jatuh” sebagai pemberian dari atas, sebab boleh jadi akan berlawanan dengan interes pihak atas itu. Ini berarti bahwa menegaskan kedaulatan rakyat menyangkut peningkatan kesadaran politik rakyat, yaitu kesadaran akan hak-haknya, sekaligus kesadaran akan kewajiban-kewajibannya. Sebab “hak” dan “kewajiban” sesungguhnya adalah dua muka dari dua keping mata uang (*two sides of a coin*). Hak kita dari orang lain akan menjadi kewajiban orang lain itu kepada kita, dan kewajiban kita kepada orang lain akan merupakan hak orang itu dari kita. Demikian pula antara rakyat dan pemerintah. Hanya saja, jika satu pihak tidak menyadari hak-haknya—seperti kebanyakan rakyat yang memang berpikir sederhana—maka ia akan hanya terbebani kewajiban tanpa imbalan yang adil, dan ini adalah kezaliman. Maka, jika kita menghendaki masyarakat yang berkeadilan, salah satu urgensi perjuangannya adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat berkenaan dengan hak-hak mereka yang sah, baik menurut kemanusiaan universal maupun secara ketentuan kenegaraan.

Perjuangan dari bawah itu, sama dengan perjuangan mana pun, memerlukan komitmen batin, wawasan, dan kemampuan teknis. Juga harus didukung dengan kekayaan pengetahuan dan informasi. Berkenaan dengan yang terakhir ini, tidak mungkin kita mampu berjuang dengan berwibawa dan efektif jika kita lakukan dengan kepala “kosong”. Artikulasi yang *resourceful* dan berwibawa akan

dapat diperoleh hanya jika kepala kita “penuh” dengan informasi yang diperlukan. Dan kalau disebut “informasi” tidaklah terbatas pada pengertiannya sebagai berita atau apa yang secara populer disebut “info”. Informasi adalah pengetahuan pada umumnya, dan menyangkut kemampuan bersikap dinamis dan kritis pada berita dan pengetahuan itu. Memperkaya informasi dalam artian dinamis itulah yang hendaknya menjadi salah satu tujuan perkaderan. Tanpa informasi yang kaya dan dinamis, ungkapan-ungkapan kita, tanpa kita mampu menyembunyikannya, akan terdengar kosong sebagai klise dan stereotip.

Salah satu aspek penting meningkatkan kedaulatan rakyat adalah yang menyangkut perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia. Kedaulatan tidak mungkin terwujud tanpa tegaknya hak-hak asasi. Kita tidak perlu kecil hati dengan gencarnya kritikan dari luar negeri berkenaan dengan reputasi negara kita dalam menegakkan hak-hak asasi manusia. Sebab, meskipun mungkin ada di antara bahan kritikan itu yang benar, namun tidaklah berarti bahwa keadaan hak-hak asasi di negeri para pengkritik itu lebih bagus dari keadaan di negeri kita. Justru dalam beberapa hal kita masih lebih baik daripada mereka. Gaji wanita di Indonesia, misalnya, adalah sama dengan pria, jika pendidikannya sama dan tanggung jawab serta kedudukan pekerjaannya sama. Di Amerika, gaji wanita lebih rendah daripada pria, sekalipun berpendidikan sama, berkedudukan pekerjaan dan tanggung jawab sama. Sejak merdeka, Indonesia telah memberi hak politik penuh kepada kaum wanita untuk dipilih dan memilih. Karena itu, kita mempunyai tradisi peran wanita yang besar dalam perpolitikan kita, baik di kalangan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Tetapi, tidaklah demikian dengan negeri Swiss—negeri yang disebut paling banyak dicontoh dalam sistem perundangan modern—yang baru sejak tahun 1980-an memberikan hak politik kepada kaum wanita.

Apalagi Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam inti ajarannya sendiri. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk kebaikan (*fithrah*) yang berpembawaan

asal kebaikan dan kebenaran (*ḥanīf*). Manusia adalah makhluk yang tertinggi (sebaik-baik ciptaan), dan Allah memuliakan anak-cucu Adam ini serta melindunginya di daratan maupun di lautan. Lebih dari itu, Allah mendekritkan, berdasarkan “pengalaman” pembunuhan Qabil atas Habil (Cain terhadap Abel)—dua anak Adam:

“Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa dosa pembunuhan atau merusakkan di bumi maka (dosanya) adalah bagaikan membunuh seluruh umat manusia; dan barang siapa menghidupi satu jiwa maka (pahalanya) adalah bagaikan menghidupkan seluruh umat manusia,” (Q 5:32).

Jadi, agama kita mengajarkan bahwa masing-masing jiwa manusia itu mempunyai harkat dan martabat yang senilai dengan manusia sejagad. Masing-masing pribadi manusia mempunyai nilai kemanusiaan universal. Maka, kejahatan kepada seorang pribadi adalah sama dengan kejahatan kepada manusia sejagad, dan kebaikan kepada seorang pribadi adalah sama dengan kebaikan kepada manusia sejagad. Inilah dasar yang amat tegas dan tandas bagi pandangan kewajiban manusia untuk menghormati sesamanya dengan hak-hak asasinya yang sah.

Demikian pula berkenaan dengan hak-hak wanita, buruh, para pekerja, dan seterusnya, Islam mengajarkan nilai-nilai yang jauh lebih luhur daripada ajaran mana pun. Mengenai buruh atau kaum pekerja, bahkan kaum budak, Nabi saw menegaskan dalam sebuah pidato pada saat-saat menjelang wafat. Isi pidato tersebut antara lain demikian:

Wahai manusia! Ingatlah Allah! Ingatlah Allah, berkenaan dengan agamamu dan amanatmu!

Ingatlah Allah! Ingatlah Allah, berkenaan dengan orang yang kamu kuasai dengan tangan kananmu (budak, buruh, dan lain-lain). Berilah mereka makan seperti yang kamu makan, dan berilah pakaian seperti yang kamu kenakan! Janganlah mereka kamu bebani dengan

beban yang mereka tidak mampu memikulnya, sebab mereka adalah daging, darah, dan makhluk seperti kamu! Ketahuilah, bahwa orang yang bertindak zalim kepada mereka, maka akulah musuh orang itu di hari kiamat, dan Allah adalah Hakim mereka.²

Begitulah sebagian kecil yang kita dapatkan dalam ajaran agama sebagai pangkal-tolak komitmen kita pada masalah hak-hak asasi. Karena itu, dalam kesempatan kami membawakan makalah tentang hak-hak asasi manusia dalam Loka Karya Nasional II Hak-hak Asasi Manusia oleh Deparlu bekerja sama dengan Komnas HAM beberapa waktu yang lalu, seorang pejuang hak-hak asasi manusia di Filipina mengatakan respeknya yang tinggi pada nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Berdasarkan itu dia juga menyatakan keyakinannya bahwa rumusan-rumusan internasional tentang hak-hak asasi, seperti Deklarasi Universal Hak-hak Asasi oleh PBB pada tahun 1948, tidak lain hanyalah “titik-temu rendah” (*lowest common denominator*) dari pandangan-pandangan kemanusiaan yang ada. Sebagai “titik-temu rendah”, maka sesungguhnya tuntutan hak-hak asasi dalam instrumen-instrumen internasional itu masih lebih rendah nilainya daripada yang dituntut oleh Islam.

Tetapi, herankah kita bahwa umat Islam tampak seperti tidak mengindahkan ajaran agamanya tentang hak-hak asasi manusia itu? Tentu saja tidak, karena contoh bagaimana umat Islam meninggalkan sebagian ajaran agamanya yang justru fundamental banyak sekali. Apalagi jika kita terpukau hanya kepada segi-segi simbolik dan formal dari agama, maka kemungkinan kita tidak menjalankan hal-hal lebih esensial menjadi lebih besar lagi. Maka sesungguhnya, jika umat Islam benar-benar berharap memperoleh kejayaannya kembali seperti yang dijanjikan Allah, mereka harus memperbarui komitmen mereka pada berbagai nilai asasi Islam, dan tidak terpukau pada hal-hal yang lahiriah semata. Hal-hal lahiriah itu memang kita

² Muhammad Khalil al-Khathib, *Khuthāb al-Rasūl* (Kairo: Dar al-Fadlilah, tth.), h. 313.

perluan dan tetap terus harus kita perhatikan, namun dengan kesadaran penuh bahwa fungsinya adalah untuk pelebagaan atau institusionalisasi nilai-nilai yang lebih esensial dan substansif. Ini pun—jika HMI berkeinginan untuk mampu menatap masa depan dengan sukses—harus ditanamkan kepada para anggota dan aktivisnya melalui sistem perkaderan, dalam rangka meningkatkan misinya menegakkan kedaulatan rakyat dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.

HMI, KAHMI, dan ICMI

Sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, HMI dalam perkembangannya sekarang ini—setelah hadir selama hampir setengah abad—adalah sangat beruntung. Ia kini memiliki lingkungan atau “*environment*” yang tangguh sekaligus kondusif bagi perjuangan mengemban misinya. Ini terlihat pada lingkungan HMI yang bersifat horizontal, berupa suasana umum “kebangkitan” Islam di negeri kita, dan yang bersifat vertikal, berupa pertumbuhannya sendiri “ke atas” melalui para alumninya. Sebab, alumni HMI—jika kita kembalikan pada bunyi konstitusi Himpunan—tidak lain adalah wujud nyata sumber daya manusia yang dicita-citakan HMI, yaitu “insan akademis pencipta dan pengabdikan yang bernafaskan Islam.”

Soal apakah setiap alumnus HMI adalah orang insan akademis, rasanya tidaklah terlalu prinsipil. Demikian pula apakah dia adalah seorang yang berdaya cipta atau kreatif, kiranya juga tidaklah terlalu sentral. Tetapi, apakah seorang alumnus HMI adalah seorang pengabdikan, dalam arti membaktikan hidupnya untuk masyarakat, dan tidak untuk diri sendiri semata secara egoistis, sungguh sangat penting. Sebab pengabdikan seperti itu, apalagi dalam kaitannya dengan “nafas Islam”, adalah sikap peribadatan yang saleh, demi mencapai rida Allah. Karena itu, perkataan “pengabdikan” mengandung makna tampilnya sosok kesadaran dengan kesadaran etis dan moral

atau *al-akhlāq al-karīmah* seperti telah dikemukakan di bagian terdahulu. Inilah yang “*fardlu ‘ayn*”, yang mesti ada pada setiap individu alumni HMI. Tanpa adanya *al-akhlāq al-karīmah* itu seorang alumnus HMI dianggap gagal dalam mewujudkan tujuan Himpunan. Secara moral dan etis dia sudah berada di luar lingkaran HMI. Ini disebutkan sebagai peringatan bahwa kita wajib terus-menerus menjaga integritas HMI, baik berkenaan dengan mereka yang masih menjadi anggota, maupun lebih-lebih lagi terhadap mereka yang sudah menjadi alumni. Karena alumni merupakan wujud nyata sumber daya manusia yang dicita-citakan HMI.

Oleh karena itu, HMI (termasuk para alumninya), tetap harus memiliki jiwa independen yang tegar dan konsisten, bermoral dan etis. Sama dengan semua orang, para alumni HMI berhak didengar suara dan pendapatnya. Tetapi, juga sama dengan terhadap semua orang, tidak semua yang didengar dari alumni mesti secara serta merta diiyakan dan ditaati. Selamanya tetap diperlukan sikap-sikap kritis “yang membangun”, dengan adil, jujur, dan berakhlak, yang bahkan menurut al-Qur’an biar pun mengenai diri sendiri dan para kerabat (Q 4:135). Dalam interaksi sosial inilah, juga dalam interaksi sosial yang lebih luas, HMI harus mempertahankan milik dan kehormatannya yang paling berharga, yaitu independensi. Dan independensi itu tidak lain ialah hak bebas untuk memutuskan “*the right to decide*”, meskipun proses menuju pada keputusan itu harus melibatkan pengumpulan dan penggalangan informasi seluas-luasnya.

Dari situlah timbul pandangan bahwa hubungan antara HMI dan KAHMI sebaiknya bersifat aspiratif dan konsultatif. Setiap alumnus HMI harus tetap mampu menghadirkan bayangan peran kemahasiswaan para anggota HMI, dan setiap anggota HMI harus mampu membayangkan dirinya menghadapi masa ketika dia sendiri akan menjadi seorang alumnus: bagaimana dia akan dapat terus berpegang pada cita-cita dasar HMI, menjadi seorang SDM Indonesia yang berpengabdian tinggi kepada masyarakat menuju rida Allah.

Linkungan atau *environment* lain bagi HMI, yang bersifat *immediate*, adalah ICMI. Tidak seperti KAHMI, ICMI bukanlah kelanjutan langsung dari HMI. Namun, tidak dapat diingkari bahwa ICMI, dilihat dari pribadi-pribadi yang terlibat dalam proses kelahirannya maupun mungkin sebagian dari aspirasinya, sedikit banyak dapat (sekali lagi, “dapat”, artinya tidak “harus”) menjadi *environment* perjuangan HMI dalam melaksanakan misinya.

ICMI mempunyai konstituensi yang sekaligus lebih luas dan lebih sempit daripada HMI dan KAHMI. Lebih luas, karena ia mencakup para anggota yang tidak hanya berlatar belakang HMI, sekalipun kenyataannya sebagian besar memang berlatar belakang HMI; lebih sempit, karena tidak seluruh mereka yang berlatar belakang HMI adalah anggota ICMI. Karena itu, ICMI dapat menjadi salah satu sarana untuk memperjuangkan misinya, khususnya yang berkenaan dengan dorongan gerak ke atas ataupun mobilitas horizontal dan vertikal (yang nilainya “*fardl-u kifāyah*” saja, tidak “*fardl-u ‘ayn*”, jadi tidak melibatkan semua orang). Mobilitas ini amat penting guna mewujudkan keseimbangan baru dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik negeri kita yang wajar, adil, terbuka, dan demokratis. Dan untuk mengakhiri ketimpangan warisan kolonial. Justru inilah salah satu tujuan perjuangan merebut kemerdekaan dan mengusir penjajah. Untuk mereka yang gugur dalam perjuangan itu didirikan masjid-monumen Syuhada di ibukota revolusi dan masjid-monumen Istiqlal (Kemerdekaan) di ibukota proklamasi. [❖]